



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah, diperlukan perencanaan kerjaan rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2025 diperlukan adanya Road Map Reformasi Birokrasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2021-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Briokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Reformasi Birokrasi adalah Proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap konkret realistis, sungguh-sungguh , berpikir diluar kebiasaan yang ada , perubahan paradigma dengan upaya luar biasa.
5. Road Map Birokrasi adalah Rencana Kerja Rinci dan Berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
6. Prioritas Perangkat Daerah adalah Fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing perangkat daerah.
7. *Quick Wins* adalah Fokus Perubahan yang dengan cepat dapat dilakukan perubahannya, dapat diterapkan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun, merupakan satu fungsi dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakat/ pemangku kepentingan dan perubahan yang dilakukan memberikan dampak sangat berarti bagi masyarakat sehingga memberikan citra positif terhadap reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
8. Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi yang selanjutnya disebut Zona WBK adalah penentuan satu unit tertentu yang melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh unit kerja lainnya.

Pasal 2

- a. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2025 sebagai acuan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2025.
- b. Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arah dan digunakan sebagai acuan pelaksanaan reformasi birokrasi bagi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Daerah agar terciptanya birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif,

berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara.

- c. Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB II

AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 3

- (1) Area perubahan yang menjadi agenda reformasi Pemerintah Daerah meliputi 8 (delapan) aspek manajemen Pemerintahan Daerah.
- (2) Aspek manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Manajemen Perubahan;
 - b. Deregulasi Kebijakan;
 - c. Penataan Organisasi;
 - d. Penataan Tata Laksana;
 - e. Penataan SDM Aparatur;
 - f. Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Penguatan Pengawasan; dan
 - h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

- a. Ringkasan Eksekutif
- b. BAB I Pendahuluan
 1. Latar Belakang;
 2. Tujuan; dan
 3. Sistematika Penulisan.

- c. BAB II Evaluasi Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - 1. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2016-2020;
 - 2. Dampak Hasil Kebijakan Reformasi Birokrasi;
 - 3. Kendala Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2016-2020.
- d. BAB III Analisis Lingkungan Strategis
 - 1. Lingkungan Reformasi Birokrasi;
 - a) Netralitas Birokrasi;
 - b) Penegakan dan Kepastian Hukum;
 - c) Administrasi dan Kelembagaan;
 - d) Budaya Birokrasi;
 - e) Globalisasi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 - f) Revolusi Industri 4.0
 - 2. Isu Strategis Reformasi Birokrasi;
 - a) Penyederhanaan Struktur dan Kelembagaan Birokrasi;
 - b) Transformasi Digital;
 - c) Pelayanan Publik (Administratif, Regulasi dan Jasa)
- e. BAB IV Arah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2021-2025
 - 1. Arah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024;
 - a) Tujuan;
 - b) Sasaran;
 - c) Strategi Pelaksanaan;
 - 2. Arah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang 2021-2025;
 - a) Arah Pelaksanaan Pembangunan Daerah 2019-2023;
 - b) Kondisi yang Diharapkan Dari Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2021-2025;
 - 3. Rencana Aksi
 - a) Program Mikro;
 - b) Quick Wins;
- f. BAB V Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2021-2025
 - 1. Pengorganisasian;
 - a) Tim Pengarah;
 - b) Tim Pelaksana;
 - 2. Monitoring dan Evaluasi;
 - a) *Monitoring*;
 - b) Evaluasi;
 - c) Anggaran Monitoring dan Evaluasi;

3. Sinkronisasi dengan Rencana Strategis dan Pelaksanaan.
- g. BAB VI Penutup
- h. Lampiran :
 1. Sasaran Dan Target Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang 2021-2025; dan
 2. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang 2021-2025.

BAB IV
TIM REFORMASI BIROKRASI
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Tangerang Tahun 2021-2025 dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2025 dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Tangerang Tahun 2021-2025 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Road map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2025 dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Daerah.
- (2) Perubahan Road Map sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan masukan dan arahan dari Tim Reformasi Birokrasi Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2016-2020 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 1 Maret 2021

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang

pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 17

LAMPIRAN I

SASARAN DAN TARGET REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA TANGERANG 2021-2025

Sasaran Reformasi Birokrasi	Indikator	Satuan	Baseline 2020	Target					Leading Sector (OPD)
				2021	2022	2023	2024	2025	
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks Perilaku Antikorupsi	Indeks (Angka 1-4)	3,14 (Cukup Bersih; 2019)	3,14 (Cukup Bersih)	3,14 (Cukup Bersih)	3,14 (Cukup Bersih)	3,14 (Cukup Bersih)	3,14 (Cukup Bersih)	Inspektorat
	Nilai SAKIP	Predikat/Angka 1-100	B (64,67)	BB (>70-80)	BB (>70-80)	BB (>70-80)	A (>80-90)	A (>80-90)	Bappeda
	Opini BPK	Kategori/Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKD
	Indeks Kepemimpinan Perubahan	Indeks	-				Baik		Bagian Organisasi Setda
	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	-				Baik		Bagian Hukum Setda
	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	-				81-89,99 (Baik)		Bagian Hukum Setda
	Indeks Perencanaan	Indeks	-						Bappeda
	Maturitas SPIP	Level	3	3	3	4	4	4	Inspektorat
	Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	4	4	4	Inspektorat
	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Indeks					Baik		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
Birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	Indeks (Angka 0-5)	3,44 (Baik)	3,45 (Baik)	3,48 (Baik)	3,48 (Baik)	3,50 (Baik)	3,50 (Baik)	Dinas Komunikasi dan Informatika

LAMPIRAN I

Sasaran Reformasi Birokrasi	Indikator	Satuan	Baseline 2020	Target					Leading Sector (OPD)
				2021	2022	2023	2024	2025	
	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks (Angka 0-100)	89	89,5	90	91	91,5	92	BKPSDM
	Indeks Sistem Merit	Indeks (Angka 0-1) atau Kategori	345	350	350	350	350	350	BKPSDM
	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	Indeks		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	BKPSDM
	Indeks Pengawasan Kearsipan	Kategori/Nilai atas hasil Pengawasan Kearsipan		80	80	80	80	80	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Indeks Pengelolaan Keuangan:	Indeks					Baik		BPKD
	Indeks Pengelolaan Aset	Indeks					Baik		BPKD
	Indeks Pemerintahan Daerah	Indeks					Baik		Bagian Organisasi Setda
	Tingkat Kematangan OPD (Permendagri 99/2018)	Nilai	44,98	44,98	44,98	50,00	50,00	50,20	Bagian Organisasi Setda
	Hasil Evaluasi Kelembagaan berdasarkan	Nilai	69,26	69,50	69,50	70,00	70,00	70,20	Bagian Organisasi Setda

LAMPIRAN I

Sasaran Reformasi Birokrasi	Indikator	Satuan	Baseline 2020	Target					Leading Sector (OPD)
				2021	2022	2023	2024	2025	
	Permen PANRB 20/2018								
Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Indeks (Angka 1-5)	A- (4,01-4,50)	A	A	A	A	A	Bagian Organisasi Setda
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka 1-100	84,33	84,50	84,75	85,00	85,50	85,75	Bagian Organisasi Setda

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA TANGERANG 2021-2025

I. Manajemen Perubahan

No	Kegiatan/Subkegiatan Prioritas	Waktu Pelaksanaan					Leading Sector (OPD)
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Pemantapan Pelaksanaan Tugas Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah:						Bagian Organisasi Setda
	1) Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang 2021-2025	✓					
	2) Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Internal Perangkat Daerah	✓					
	3) Rapat Rutin Tim Reformasi Birokrasi	✓	✓	✓	✓	✓	
	4) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	✓	✓	✓	✓	✓	
	5) Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2025:						Bagian Organisasi Setda
	1) Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang 2021-2025	✓					
	2) Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang Selaras dengan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang 2021-2025	✓					
	3) Sosialisasi/Internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang 2021-2025	✓					
	4) Pembuatan/Penambahan Media Komunikasi dan Penyampaian Upaya RB (yang sedang dan akan dilakukan) dan Hasil Capaian Reformasi Birokrasi Secara Reguler	✓	✓	✓	✓	✓	
	5) Sinkronisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 2021-2025 dalam Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pemerintah Kota Tangerang	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi:						Inspektorat
	1) Pelatihan Tim Assessor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	✓	✓	✓	✓	✓	
	2) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Perangkat Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	
	3) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	✓	✓	✓	✓	✓	
	4) Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)	✓	✓	✓	✓	✓	
	5) Implementasi RATL	✓	✓	✓	✓	✓	

Lampiran II

No	Kegiatan/Subkegiatan Prioritas	Waktu Pelaksanaan					Leading Sector (OPD)
		2021	2022	2023	2024	2025	
4	Pengembangan dan Penguatan Peran Agen Perubahan (Agent of Change) atau Role Model:						BKPSDM
	1) Penetapan Agen Perubahan 2021-2025	✓					
	2) Pengembangan Kapasitas Agen Perubahan	✓	✓	✓	✓	✓	
	3) <i>Knowledge sharing</i> antar-agen Perubahan	✓					
	4) Monitoring dan Evaluasi Terhadap Peran Agen Perubahan (a.l: Jumlah Agen Perubahan, Jumlah Perubahan yang Dibuat, Jumlah Perubahan yang Diintegrasikan dalam Sistem Manajemen)	✓	✓	✓	✓	✓	
	5) Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Pengembangan Budaya Kerja:						Bagian Organisasi Setda
	1) Pembentukan Kelompok Budaya Kerja	✓					
	2) Sosialisasi dan Internalisasi	✓					
	3) Implementasi Budaya Kerja	✓	✓	✓	✓	✓	
	3) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Budaya Kerja	✓	✓	✓	✓	✓	
	4) Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	✓	✓	✓	✓	✓	

Lampiran II

II. Deregulasi Kebijakan

No	Kegiatan/Subkegiatan Prioritas	Waktu Pelaksanaan					Leading Sector (OPD)
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Harmonisasidan Deregulasi Kebijakan/Kebijakan:						Bagian Hukum Setda
	1) Identifikasi, Analisis, dan Pemetaan Kebijakan/Peraturan yang Tidak Harmonis/Tidak Sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓	
	2) Revisi Kebijakan/Peraturan yang Tidak Harmonis/Tidak Sinkron Dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓	
	3) Publikasi (JDIH) dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Penguatan Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Kebijakan/Peraturan:						Bagian Hukum Setda
	1) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Kebijakan/Peraturan	✓	✓	✓	✓	✓	
	2) Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	✓	✓	✓	✓	✓	

Lampiran II

III. Penataan Organisasi

No	Kegiatan/Subkegiatan Prioritas	Waktu Pelaksanaan					Leading Sector (OPD)
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Evaluasi dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah dalam Rangka Penyederhanaan Birokrasi. <i>Catatan: Bagian dari Quick Wins. Disajikan dalam Matriks Quick Wins</i>	✓					Bagian Organisasi Setda
2	Peningkatan Kematangan Organisasi Perangkat Daerah:						Bagian Organisasi Setda
	1) Sosialisasi	✓	✓	✓	✓	✓	
	2) Pendampingan	✓	✓	✓	✓	✓	
	3) Penilaian Mandiri dan Penyiapan Bukti sesuai Pedoman	✓	✓	✓	✓	✓	
	4) Tindak Lanjut Hasil Penilaian	✓		✓		✓	

Lampiran II

IV. Penataan Tatalaksana

No	Kegiatan/Subkegiatan Prioritas	Waktu Pelaksanaan					Leading Sector (OPD)
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Peta Proses Bisnis:						Bagian Organisasi Setda
	1) Evaluasi Peta Proses Bisnis yang Sesuai dengan Efektivitas Hubungan Kerja Antar-unit Organisasi	✓			✓		
2	Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP):						Bagian Organisasi Setda
	1) Bimbingan Teknis	✓					
	2) Pendampingan dan Penyusunan SOP (Penjabaran Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis kedalam SOP)	✓					
	3) Penerapan SOP	✓	✓	✓	✓	✓	
	4) Evaluasi Penerapan SOP	✓	✓	✓	✓	✓	
	5) Tindak Lanjut Hasil Evaluasi (antara lain: <i>Review SOP</i>)	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) <i>Catatan: Bagian dari Quick Wins. Disajikan dalam Matriks Quick Wins</i>	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Penguatan Tata kelola Kearsipan Berbasis Digital:						Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dan Diskominfo
	1) Peningkatan Kapasitas Pengelola Arsip Perangkat Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	
	2) Pengembangan <i>Electronic Filing System (EFS)</i> sesuai <i>Masterplan SPBE</i>	✓	✓	✓	✓	✓	
	3) Implementasi Pengelolaan Arsip Secara Tertib dan Terpadu Dengan Penerapan <i>e-Government</i> (Integrasi kearsipan)	✓	✓	✓	✓	✓	
	4) Pemantauan dan Evaluasi	✓	✓	✓	✓	✓	
	5) Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Pedoman Perundang-undangan:						Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	1) Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Pedoman	✓	✓	✓	✓	✓	
6	Pengelolaan Aset Daerah sesuai Pedoman Perundang-undangan:						Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	1) Implementasi Pengelolaan Aset Daerah sesuai dengan Pedoman	✓	✓	✓	✓	✓	
7	Penguatan Keterbukaan Informasi Publik:						Dinas Komunikasi dan Informatika
	1) Penguatan Kapasitas PPID		✓	✓	✓	✓	
	2) Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik melalui Layanan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	✓	✓	✓	✓	✓	

V. Penataan SDM Aparatur

Lampiran II

No	Kegiatan/Subkegiatan Prioritas	Waktu Pelaksanaan					Leading Sector (OPD)
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi:						
	1) Perhitungan Kebutuhan Pegawai (Per Tahun dan Lima Tahun)	✓	✓	✓	✓	✓	BKPSDM
	2) <i>Review</i> Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)	✓					Bagian Organisasi Setda
2	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi:						
	1) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	✓	✓	✓	✓	✓	BKPSDM
	2) <i>Assessment</i> Pegawai	✓	✓	✓	✓	✓	BKPSDM
	3) <i>Review Training Need Assessment/TNA</i> dan Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai	✓	✓	✓	✓	✓	
	4) Pelaksanaan Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	✓	✓	✓	✓	✓	
	5) Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Promosi Jabatan secara Terbuka:						BKPSDM
	Promosi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Penetapan Kinerja Individu dan Penguatan Implementasi <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i>:						BKPSDM
	1) Penerapan Penetapan Kinerja Individu Seluruh Pegawai (Kesesuaian dengan Indikator Kinerja Individu Level di Atasnya dan Penilaian Kinerja Individu dengan Kinerja Organisasi)	✓	✓	✓	✓	✓	
	2) Pengukuran Kinerja Individu secara Periodik	✓	✓	✓	✓	✓	
	3) Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian Kinerja Individu	✓	✓	✓	✓	✓	
	4) Pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> atas hasil Kinerja Individu untuk Pengembangan Karier/ <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai:						BKSDPM
	1) Pelaksanaan Seluruh Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku	✓	✓	✓	✓	✓	
	2) Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Seluruh Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku	✓	✓	✓	✓	✓	
	3) Pemberian Sanksi (<i>Punishment</i>) dan Imbalan (<i>Reward</i>)	✓	✓	✓	✓	✓	
6	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan:						BKPSDM
	1) Implementasi Standar <i>Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Jabatan Pimpinan Tinggi (Manajerial, Sosio-Kultural, dan Teknis)</i> dan Jabatan Fungsional (<i>Manajerial dan Sosio-Kultural</i>) sesuai yang telah ditetapkan oleh Kementerian PANRB serta Instansi Pembina (<i>Teknis</i>)	✓	✓	✓	✓	✓	
	2) Evaluasi Jabatan Berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan	✓					

Lampiran II

No	Kegiatan/Subkegiatan Prioritas	Waktu Pelaksanaan					Leading Sector (OPD)
		2021	2022	2023	2024	2025	
7	Pengembangan Implementasi Manajemen Talenta (Talent Pool):						BKPSDM
	1) Penetapan Manajemen Talenta ASN Instansi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian	✓	✓	✓	✓	✓	
	2) Penyelenggaraan Manajemen Talenta Instansi: a) Akuisisi Talenta b) Pengembangan Talenta c) Retensi Talenta d) Penempatan Talenta e) Pemantauan dan Evaluasi	✓	✓	✓	✓	✓	
	3) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Talenta Instansi secara Periodik	✓	✓	✓	✓	✓	
8	Penguatan Database dan Sistem Informasi Kepegawaian:						BKPSDM
	1) Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian sesuai perkembangan terkini dan Kebutuhan Organisasi	✓	✓	✓	✓	✓	
	2) Pemutakhiran Database	✓	✓	✓	✓	✓	
	3) Pemanfaatan Sistem Informasi Kepegawaian sebagai Pendukung Pengambilan Kebijakan Manajemen SDM dan Kemudahan Akses oleh Pegawai	✓	✓	✓	✓	✓	

Lampiran II

VI. Penguatan Akuntabilitas

No	Kegiatan/Subkegiatan Prioritas	Waktu Pelaksanaan					Leading Sector (OPD)
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Penguatan Keterlibatan Pimpinan dan Seluruh Penanggung Jawab dalam Perencanaan Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Kinerja, serta Pelaporan Kinerja:						Bappeda
	1) Keterlibatan Pimpinan Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah dan Seluruh Penanggungjawab dalam Penyusunan Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja	✓	✓	✓	✓	✓	
	2) Pemantauan Pimpinan Daerah dan Pimpinan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Kinerja	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Penguatan Perencanaan Terintegrasi:						Bappeda dan BPKD
	1) Pengembangan dan Pengintegrasian Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja	✓	✓	✓	✓	✓	
	2) Pengelolaan Aplikasi Terintegrasi untuk Menciptakan Efektifitas dan Efisiensi Anggaran	✓	✓	✓	✓	✓	
	3) Pendampingan dan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Pedoman (Format, Substansi, Waktu)	✓	✓	✓	✓	✓	
	4) Pendampingan dan Penyusunan Renja Perangkat Daerah (Format, Substansi, Waktu)	✓	✓	✓	✓	✓	
	5) Penyusunan RKPD	✓	✓	✓	✓	✓	
	6) Pendampingan dan Penyusunan RKA (Penggunaan Anggaran yang Efektif dan Efisien, Jumlah Program/Kegiatan yang Mendukung Tercapainya Kinerja Utama Organisasi, Jumlah Anggaran yang Berhasil <i>Direfocussing</i> untuk Mencapai Kinerja Utama Organisasi)	✓	✓	✓	✓	✓	
	7) Pemantauan dan Evaluasi	✓	✓	✓	✓	✓	
	8) Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Peningkatan Kualitas Penyelarasan Kinerja Unit kepada Kinerja Organisasi (Goal and Strategy Cascade):						Bappeda
	1) Pendampingan dan Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan Pohon Kinerja (<i>Cascading</i>)	✓	✓	✓	✓	✓	
	2) Pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> atas Hasil Capaian Perjanjian Kinerja						
4	Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja:						Bappeda
	1) Pembaruan/ <i>Up Date</i> Data Kinerja	✓	✓	✓	✓	✓	
	2) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja secara Berkala	✓	✓	✓	✓	✓	

Lampiran II

No	Kegiatan/Subkegiatan Prioritas	Waktu Pelaksanaan					Leading Sector (OPD)
		2021	2022	2023	2024	2025	
3)	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan Pedoman (Format, Substansi, Waktu)	✓	✓	✓	✓	✓	
4)	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Tangerang sesuai dengan Pedoman (Format, Substansi, Waktu)	✓	✓	✓	✓	✓	

Lampiran II

VII. Penguatan Pengawasan

No	Kegiatan/Subkegiatan Prioritas	Waktu Pelaksanaan					Leading Sector (OPD)
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Penguatan Penerapan SPIP:						Inspektorat
	1) <i>Review</i> Persiapan: a) <i>Knowing</i> (Pemahaman): Sosialisasi Berkelanjutan b) <i>Mapping</i> (Pemetaan)	✓	✓	✓	✓	✓	
	2) Pelaksanaan: a) <i>Norming</i> (Pembangunan Infrastruktur) b) <i>Forming</i> (Internalisasi/Implementasi): (1) Lingkungan Pengendalian (2) Penilaian Risiko (3) Kegiatan Pengendalian (4) Informasi dan Komunikasi (5) Pemantauan Pengendalian c) <i>Performing</i> (Pengembangan Berkelanjutan)	✓	✓	✓	✓	✓	
	Penguatan APIP:						Inspektorat
2	1) Pemenuhan Rasio APIP	✓	✓	✓	✓	✓	
	2) Peningkatan Kompetensi APIP	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Penguatan Pengendalian Benturan Kepentingan:						Inspektorat
	1) Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	✓	✓	✓	✓	✓	
	2) Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan: a) Identifikasi Situasi Benturan Kepentingan b) Rekomendasi Pengambilan Tindakan yang Diperlukan Jika Penyelenggara Berada dalam Situasi Benturan Kepentingan	✓	✓	✓	✓	✓	
	3) Evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan	✓	✓	✓	✓	✓	
	4) Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Penguatan Pengendalian Gratifikasi:						Inspektorat
	1) Optimalisasi Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi dalam Penanganan Gratifikasi	✓	✓	✓	✓	✓	
	2) Sosialisasi, Pendampingan dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	✓	✓	✓	✓	✓	
	3) Sosialisasi, Pendampingan dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	✓	✓	✓	✓	✓	
	4) Pemantauan dan Evaluasi	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Penguatan Whistle-Blowing System (WBS):						Inspektorat

Lampiran II

No	Kegiatan/Subkegiatan Prioritas	Waktu Pelaksanaan					Leading Sector (OPD)
		2021	2022	2023	2024	2025	
	1) Penelaahan dan/atau Pemeriksaan Atas Pengaduan	✓	✓	✓	✓	✓	
	2) Tindak Lanjut atas Penelaahan dan/atau Pemeriksaan	✓	✓	✓	✓	✓	
	3) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi WBS	✓	✓	✓	✓	✓	
	4) Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi						
6	Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM):						Inspektorat
	1) Pencanaan Pembangunan ZI	✓	✓	✓	✓	✓	
	2) Proses Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM	✓	✓	✓	✓	✓	
	3) Penilaian oleh Tim Penilai Internal (TPI) yang Dilaksanakan oleh APIP	✓	✓	✓	✓	✓	
	4) Pengusulan Perangkat Daerah Predikat Menuju WBK/WBBM kepada Menteri PANRB	✓	✓	✓	✓	✓	
	5) Pemantauan Perangkat Daerah yang Telah Meraih Predikat WBK/WBBM	✓	✓	✓	✓	✓	
	6) Replikasi pada Perangkat Daerah Lain	✓	✓	✓	✓	✓	
	7) Pelaporan Berkala Oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam Rangka Pembangunan ZI	✓	✓	✓	✓	✓	
7	Penguatan Penanganan Pengaduan Masyarakat:						Inspektorat
	1) Tindaklanjuti pengaduan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	
	2) Pemantauan dan Evaluasi pengelolaan	✓	✓	✓	✓	✓	
	3) Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi	✓	✓	✓	✓	✓	
8	Penguatan Efektivitas Manajemen Risiko:						Inspektorat
	1) Sosialisasi dan Internalisasi	✓	✓	✓	✓	✓	
	2) Mengidentifikasi Risiko	✓	✓	✓	✓	✓	
	3) Menganalisis Risiko	✓	✓	✓	✓	✓	
	4) Membuat Rencana Manajemen Risiko	✓	✓	✓	✓	✓	
	5) Mengimplementasikan Manajemen Risiko	✓	✓	✓	✓	✓	
	6) Meninjau (<i>Review</i>) dan Memantau Risiko	✓	✓	✓	✓	✓	
	7) Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko	✓	✓	✓	✓	✓	
	8) Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko	✓	✓	✓	✓	✓	
9	Penguatan e-Procurement dan Pengembangan e-Catalog Lokal:						Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
	1) Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Pedoman	✓	✓	✓	✓	✓	

VIII. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Lampiran II

No	Kegiatan/Subkegiatan Prioritas	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Review dan Penerapan Standar Pelayanan Publik:						Bagian Pemerintahan Setda
	1) Review atas Standar Pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Penguatan Budaya Pelayanan Prima:						Bagian Organisasi Setda dan OPD Pelayanan (DPMPSTP, Disdukcapil dan RSUD)
	1) Peningkatan Kompetensi	✓	✓	✓	✓	✓	
	2) Pemantauan dan Evaluasi (antara lain: Informasi Pelayanan Mudah Diakses melalui Berbagai Media, Sistem Pemberian Penghargaan dan Sanksi bagi Petugas Pemberi Layanan, Sistem Kompensasi kepada Penerima Layanan Apabila Layanan Tidak Sesuai Standar)	✓	✓	✓	✓	✓	
	3) Tindak Lanjut hasil Evaluasi	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Penguatan Inovasi Pelayanan Publik:						Bagian Organisasi
	1) Sosialisasi (a.l: Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik/KIPP dan sejenisnya)	✓	✓	✓	✓	✓	
	2) Pendampingan Penyusunan Proposal Inovasi Pelayanan Publik	✓	✓	✓	✓	✓	
	3) Penerapan Inovasi Pelayanan Publik dalam Sistem Manajemen Pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik:						OPD Pelayanan (DPMPSTP, Disdukcapil dan RSUD)
	1) Pembentukan dan Penguatan Media Pengaduan dan Unit Pengelola Pengaduan dan Konsultansi Pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	
	2) Pengelolaan dan Tindak Lanjut Seluruh Pengaduan sesuai dengan NSPK	✓	✓	✓	✓	✓	
	3) Pemantauan dan Evaluasi	✓	✓	✓	✓	✓	
	4) Tindak lanjut Hasil Evaluasi	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Survei Kepuasan Masyarakat:						Bagian Organisasi Setda & OPD Pelayanan (DPMPSTP, Disdukcapil dan RSUD)
	1) Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	
	2) Publikasi Terbuka Hasil Survei	✓	✓	✓	✓	✓	
	3) Tindak Lanjut Hasil Survei	✓	✓	✓	✓	✓	
6	Pengembangan dan Pengintegrasian Sistem Informasi Pelayanan Publik:						Dinas Komunikasi dan Informatika
	1) Penguatan Teknologi Informasi dalam Memberikan Pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	
	2) Peninjauan dan Perbaikan Berkelanjutan	✓	✓	✓	✓	✓	

IX. Quick Wins

Lampiran II

No	Kegiatan/Sub kegiatan Prioritas	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Penataan Organisasi Perangkat Daerah dalam Rangka Penyederhanaan Birokrasi:						Bagian Organisasi Setda
	1) Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah secara komprehensif (Note: setelah dilakukan pada tahun 2019)		✓				
	2) Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan Pengesahan Perubahan dalam Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota (Note: setelah dilakukan pada tahun 2019)		✓				
	3) Tindak Lanjut Evaluasi dan Penataan Organisasi dengan Penyederhanaan Birokrasi (Penyetaraan Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana ke JabatanFungsional)		✓				Bagian Organisasi Setda& BKPSDM
2	Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE):	✓					Dinas Komunikasi dan Informatika
	1) Implementasi <i>Masterplane-Government/SPBE</i> :	✓	✓	✓	✓	✓	
	a) Penyiapan Infrastruktur Dasar (<i>Hardware</i>)						
	b) Penyiapan Infrastruktur Dasar (<i>Software</i>)						
	2) Penyiapan Regulasi dan Kelembagaan	✓	✓	✓	✓	✓	
	3) Peningkatan Kapasitas SDM pada Perangkat Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	
	4) Pemantauan dan Evaluasi	✓	✓	✓	✓	✓	
	5) Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	✓	✓	✓	✓	✓	

Catatan:

- 1) Setiap kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan harus memiliki bukti (*evidence*) yang memadai sehingga harus dikelola dengan baik. Hasil monitoring/pemantauan dan evaluasi dalam setiap kegiatan harus dapat dibuktikan, misalnya laporan dan notulensi rapat. Demikian pula tindak lanjut perbaikan dari hasil monitoring/pemantauan dan evaluasi harus mempunyai bukti yang memadai sehingga dapat dibuktikan perubahan yang terjadi (*before and after reform*).
- 2) Rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi sejatinya merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sehingga sinkronisasi dan koordinasi inter-perangkat daerah dan antar-perangkat daerah mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring/pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan mutlak dilakukan.

WALI KOTA TANGERANG

ARIEF R. WISMANSYAH

Lampiran II